

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Halim, 2006, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chidir, Ali, 2007, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Ahmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munawir, S, 1985, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Adi, 2006, *E-Commerce "Memahami Perdagangan Modern Dunia Maya"*, Informatika ISS, Bandung.
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Pohan, Aulia, 2011, *Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso Brotodiharjo, R., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung.
- Sari, Diana, 2012, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, Y, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyanto, M., 2003, *E-commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi, Yogyakarta

Syofyan, Syofrin dan Asyhar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung.

Wiradipradja, Saefullah, E., 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Cetakan Ke-2*, Keni Media, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka

Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara Dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*COMMON REPORTING STANDARD*).

### **Jurnal dan Makalah**

Anditya, Anugrah, 2018, Jurnal Hukum: Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan Untuk Menanggulangi Dampak Asynchronous Information Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia, *Mimbar Hukum* Volume 30, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Direktorat Transmisi Proses Bisnis, Dokumen Analisis Payment Gateway, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lukito, Imam, 2017, Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham, Jakarta.

Risalah Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017, 2018, Perihal Pengujian UU No. 9 Tahun 2017 Terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Sekretaris Jenderal: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, 2019, Tarik PMK e-commerce, Menkeu Tegaskan Komitmen Dorong Ekosistem Ekonomi Digital, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Internet**

CNN Indonesia, “Telkom Permudah Transaksi UKM Online Dengan Finpay”, [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), diakses pada tanggal 06 Juli 2019 pada pukul 19.35 WIB.

Hutabarat, Diani, “Di Ajang WEF, Menkominfo Tegaskan Komitmen RI Kembangkan Industri Digital”, [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pada pukul 19.37 WIB.

Khairuddin, Indra, “Hubungan Operator Selular dan OTT akan Tetap Benci Tapi Rindu”, [selular.id](http://selular.id), diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pada pukul 21.45 WIB.